

# **KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (Studi di Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2007-2011)**

**Chairul Adhim**

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang  
Jl. MT. Haryono No 9-B Malang  
Chairuladhim@gmail.com*

**Abstract:** *The research aim to analyze the financial capacity of local governments Dompu over the last five years (2007-2011) to support the implementation of regional autonomy. The analysis methods are independence ratio, the degree of fiscal decentralization ratio, the ratio of routine capability index, the ratio of harmony, and growth ratios. The Result showed that : (1) based on independence ratio, the financial capacity of local government Dompu indicated the pattern of instructive relationships, (2) based on Fiscal Decentralization ratio and routine capability index rasio, the financial capacity of local government Dompu described very low to finance regional development, (3) based on the harmony rasio the local governments much more allocated routine expenditures than the development expenditure, and (4) based on the growth ratio showed positive growth. Finally, the pattern of local financial capacity of local governments Dompu was low category for supporting the implementation of regional autonomy*

**Keywords:** *Financial capability, Regional Autonomy, Local Financial Ratios*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Dompu tahun anggaran 2007-2011. Data analisis menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Indeks Kemampuan Rutin, Rasio Keserasian dan Rasio Pertumbuhan. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pola hubungan kemandirian daerah masih menunjukkan pola hubungan instruktif, berdasarkan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dan Rasio Indeks Kemampuan Rutin kemampuan keuangan masih sangat rendah dalam membiayai pembangunan daerah, berdasarkan Rasio Keserasian pemerintah daerah mengalokasikan belanja rutin dari pada belanja pembangunandan dan berdasarkan Rasio Pertumbuhan menunjukkan pertumbuhan yang positif. Secara keseluruhan, pola hubungan tingkat kemampuan keuangan, mencerminkan kategori rendah sekali dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

**Kata Kunci:** Kemampuan Keuangan, Otonomi Daerah, Rasio Keuangan Daerah

## PENDAHULUAN

Pemerintahan Daerah merupakan subsistem dari pemerintahan nasional atau Negara. Efektifitas pemerintahan negara tergantung pada efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, keberhasilan kepemimpinan di daerah menentukan kesuksesan kepemimpinan nasional. Kinerja pemerintah daerah harus sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, maka dari itu muncul kebijakan terkait otonomi daerah. Hal ini merupakan langkah yang konkret dalam mewujudkan desentralisasi pemerintahan yang sesungguhnya.

Menurut Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjadi titik awal dimulainya otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

Era otonomi daerah, daerah tidak lagi sekedar menjalankan instruksi dari pusat, tetapi benar-benar mempunyai keleluasaan untuk meningkatkan kreativitas dalam mengembangkan potensi yang sebelumnya bisa dikatakan terpasung Mardiasmo (2002:1). Pemerintah Daerah diharapkan semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat terkait dengan pembiayaan dan pengelolaan daerah. Berkenaan dengan hal itu pemerintah daerah diharapkan semakin mendekatkan diri dalam berbagai kegiatan pelayanan publik dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik. Seiring dengan semakin tingginya tingkat kepercayaan, diharapkan

tingkat partisipasi (dukungan) publik terhadap pemerintah daerah juga tinggi. Tujuan program otonomi daerah adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan perkembangan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing.

Pelaksanaan otonomi daerah, terdapat empat elemen penting yang diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Chema dan Rondinelli dalam Anita Wulandari 2001:17). Empat elemen tersebut adalah desentralisasi politik, desentralisasi fiskal, desentralisasi administrasi dan desentralisasi ekonomi. Keempat elemen tersebut menjadi kewajiban daerah untuk mengelola keuangan secara efisien dan efektif. Sehingga akan terjadi kemampuan/kemandirian suatu daerah untuk melaksanakan fungsinya dengan baik.

Salah satu elemen yang diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan komponen utama dari desentralisasi pelaksanaan otonomi daerah karena memungkinkan pemerintah mempunyai keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat, sehingga daerah dapat memaksimalkan segenap potensi yang dimiliki untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan daerah.

Berkaitan dengan hakikat otonomi daerah yaitu pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat, maka peranan pengelolaan keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk memberikan statistik perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran dan analisa terhadapnya merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk melihat kemampuan/kemandirian daerah (Yuliati, 2001:22). Kriteria penting untuk mengetahui secara

nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self-supporting* bidang keuangan, di samping faktor yang lain seperti kemampuan sumber daya alam, kondisi demografi, potensi daerah, serta partisipasi masyarakat. Faktor keuangan merupakan faktor yang esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya, dimana daerah mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang semakin mengecil.

Dalam Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 yang diubah menjadi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) adalah : “Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termaksud didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah.”

Selanjutnya dalam Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, tidak ada satupun kegiatan pemerintah di daerah yang tidak memerlukan biaya.

Pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah merupakan salah satu aspek penting bagi Pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati. Anggaran daerah pada hakikatnya merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan

tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dengan demikian maka APBD harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan dapat mengembangkan potensi daerahnya sendiri dan menggali sumber dana yang ada dan potensial guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan warga masyarakatnya. Akibatnya mekanisme pembiayaan pelaksanaan otonomi berubah yaitu diutamakan semaksimal mungkin berasal dari potensi penerimaan asli daerah baik melalui pajak daerah, retribusi daerah maupun dari laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMN) dan penerimaan lain yang dianggap sah serta potensi penerimaan lain yang masih belum terjangkau oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Adanya dampak mekanisme pembiayaan otonomi daerah, maka pemerintah daerah harus dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhan keuangan daerah tanpa harus menggantungkan diri pada bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat. Pada prinsipnya peningkatan PAD sangat menentukan dalam penyelenggaraan otonomi daerah karena semakin tinggi PAD di suatu daerah maka daerah tersebut akan menjadi mandiri dan mengurangi ketergantungan kepada pusat sehingga daerah tersebut mempunyai kemampuan untuk berotonomi. Jadi pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yang berdasarkan pada prinsip otonomi yang nyata, luas dan bertanggung jawab. Peranan pendapatan asli daerah dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun PAD maka akan semakin besar pula tersedianya jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.

Salah satu ciri utama daerah mampu dalam melaksanakan otonomi daerah terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang semakin mengecil dan diharapkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah (Yulianti, 2001:22). Oleh karena itu, Pemerintah daerah harus menaruh perhatian yang lebih besar terhadap pengelolaan keuangan daerah, yang dimana dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif atau memenuhi prinsip *value for money* serta partisipatif, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan mendorong pertumbuhan ekonomi serta kemandirian suatu daerah. Dengan demikian maka suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.

Peneliti mengambil objek penelitian pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu, dengan alasan, karena ingin mengetahui kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, sebab dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah daerah harus dapat meningkatkan kemandirian/kemampuan keuangan. Kemampuan keuangan daerah yang dimaksud adalah sampai sejauh mana daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri, guna membiayai kebutuhan keuangan daerah tanpa harus bergantung pada bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat, sehingga daerah tersebut mempunyai kemampuan untuk berotonomi

Sebagai daerah otonom, Kabupaten Dompu dalam melaksanakan urusan desentralisasi berusaha untuk dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah, salah satunya yaitu melalui program Pengembangan Usaha Agribisnis Berbasis Komoditi Lokal, meliputi : pengembangan sapi, pengembangan jagung dan pengembangan rumput laut (PIJAR). Selain dari program Pijar pemerintah Kabupaten

Dompu dapat meningkatkan melalui pengembangan Koperasi dan UMKM, pengembangan Pariwisata, penguatan kapasitas fiskal daerah, penguatan ketersediaan pangan utama yaitu padi dan Peningkatan investasi serta perluasan kesempatan kerja. Sehingga dengan adanya program ini, diharapkan dapat membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah agar mampu memiliki tingkat kemandirian/kemampuan keuangan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. (<http://dompukab.go.id/>, diakses 10 Mei 2014).

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik, khususnya terhadap APBD dan realisasinya belum banyak dilakukan sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah peraturannya. Namun, analisis rasio terhadap realisasi APBD harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Disamping meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, analisis rasio terhadap realisasi APBD juga dapat digunakan sebagai alat untuk menilai efektivitas otonomi daerah sebab kebijakan ini yang memberikan keleluasaan bagi Pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerahnya yang seharusnya bisa meningkatkan kemampuan keuangan daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan rasio keuangan, dapat diketahui apakah alokasi APBD suatu daerah dapat dikatakan efektif, efisien, dan ekonomis sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah di era otonomi daerah yaitu *value for money*. Disamping itu analisis rasio tersebut juga dapat mengindikasikan kemandirian pemerintah daerah, pertumbuhan dan pergerakan tren alokasi pendapatan, serta tingkat pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja suatu daerah. Dengan demikian maka suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah. Namun, analisis rasio terhadap realisasi APBD harus dilakukan

untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian yang telah diungkapkan di atas, maka dirasa perlu untuk meneliti mengenai kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten dengan menggunakan alat analisis yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio indeks kemampuan rutin, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan keuangan Daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten dompu selama lima tahun terakhir (2007-2011) dengan analisis rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio indeks kemampuan rutin, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Mohammad Nazir (2003:54) adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif adalah membuat deskriptif / gambaran, melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselediki. Lokasi penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Dompu di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif. Deskriptif komparatif adalah suatu jenis metode penelitian yang ingin mencari jawab secara mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisis faktor-faktor terjadinya atau munculnya fenomena tertentu (Mohammad Nazir dalam Mudrifah (2012:31). Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menghitung Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pusat dan pinjaman}}$$

- 2) Menghitung Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

$$DDF = \frac{PAD_t}{TPDt} \times 100\%$$

- 3) Menghitung Rasio Indeks Kemampuan Rutin

$$IKR = \frac{PAD}{\text{Total Pengeluaran rutin}} \times 100\%$$

- 4) Menghitung Rasio Keserasian

$$\text{Rasio Belanja Rutin} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total belanja APBD}}$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total belanja APBD}}$$

- 5) Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{PAD_{t1} - PAD_{t0}}{PAD_{t0}}$$

## HASIL ANALISIS

Kabupaten Dompu merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) Kabupaten/ Kota yang berada di Propinsi Nusa Tenggara Barat yang terletak di Pulau Sumbawa bagian tengah, dengan luas wilayah 2.324,55 Km<sup>2</sup> dan batas – batas wilayah sebagai berikut :

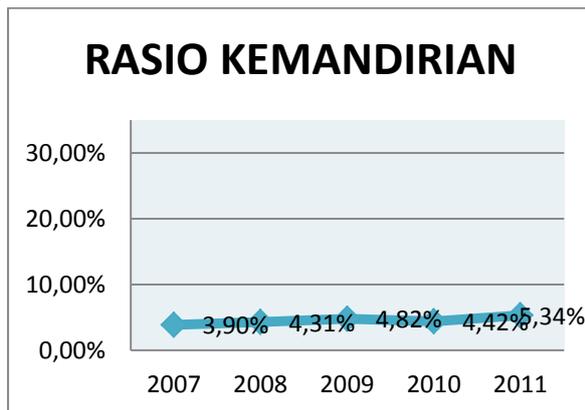
- Sebelah Utara : Laut Flores dan Kabupaten Bima
- Sebelah Selatan : Lautan Indonesia
- Sebelah Timur : Kabupaten Bima
- Sebelah Barat : Kabupaten Sumbawa

## Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Pada rasio kemandirian mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2007 rasio kemandirian mencapai 3,90%, kemudian pada tahun 2008 dan 2009 rasio kemandirian meningkat sebesar 4,31 % dan naik menjadi 4,82 %. Selanjutnya pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 4,42 % yang disebabkan menurunnya pendapatan asli daerah. Pada tahun 2011 naik kembali menjadi 5,34 %, Sehingga rata-rata rasio

kemandirian adalah sebesar 4,72 %. Jadi selama lima tahun terakhir rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Dompu, rata-rata pertumbuhannya mencapai 4.56% dengan pola hubungan intruktif. Berikut disajikan Grafik 1 rasio kemandirian keuangan daerah.

**Grafik 1**  
**Persentase Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2007-2011.**

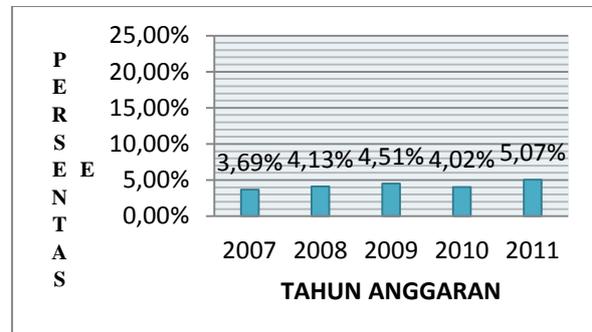


Sumber; Data diolah , 2014

### Analisis Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Berdasarkan rasio derajat desentralisasi fiskal pada tahun 2007 sebesar 3,69% dari PAD dan total pendapatan, kemudian naik 4,13% pada tahun 2008 dan pada tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 4,51%, dari PAD dan total pendapatan. Pada tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 4,02% dan pada tahun 2011 mengalami peningkatan kembali sebesar 5,07% dari PAD dan total pendapatan, sehingga dapat dilihat kemampuan keuangan daerah berdasarkan rasio derajat desentralisasi fiskal pada tahun 2007-2011 masih berada dalam skala interval 0,00% - 10,00% atau rata-rata sebesar 4,29%, masuk dalam kategori sangat kurang, karena pemerintah daerah Kabupaten Dompu masih sangat tergantung dari pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan. Berikut disajikan Grafik 2 rasio derajat desentralisasi fiskal.

**Grafik 2**  
**Hasil Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2007-2011**

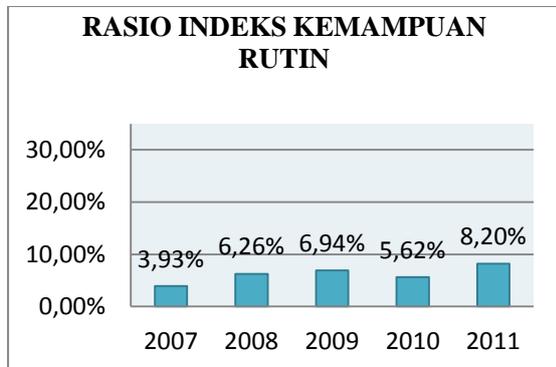


Sumber; Data diolah , 2014

### Analisis Rasio Indeks Kemampuan Rutin

Berdasarkan rasio indeks kemampuan rutin daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Dompu Pada tahun 2007 dilihat dari PAD sebesar Rp. 13.066.086.623,69 dan pengeluaran rutin sebesar Rp. 332.473.217.915,00 pertumbuhannya 3,93%, kemudian pada 2008 dan 2009 rasio indeks kemampuan rutin mencapai 6,26 % dari PAD sebesar Rp.16.151.704.694,00 dan pengeluaran rutin sebesar Rp. 257.937.454.296,00 dan 6,94 % dari PAD 18.760.509.931,42 serta dari pengeluaran rutin sebesar Rp. 270.166.815.323,00. Selanjutnya pada tahun 2010 mengalami penurunan kembali sebesar 5,62 %, hal ini diakibatkan turunnya PAD menjadi Rp.18.686.522.489,08 dan tidak diimbangi dengan pengeluaran yang meningkat menjadi Rp. 332.473.217.915,00 dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 8,20%, dimana PAD sebesar Rp. 28.153,089,631,99 dan pengeluaran rutin sebesar Rp. 343.124.172.018,00. Ini menunjukkan bahwa kemandirian keuangan Kabupaten Dompu dilihat dari rasio Indeks Kemampuan Rutin selama tahun 2007-2011 masih sangat kurang, karena masih berada dalam skala interval antara 0,00% - 20,00% yaitu rata-rata sebesar 6,19%. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan Grafik 3 rasio indeks kemampuan rutin.

**Grafik 3**  
**Hasil Perhitungan Indeks Kemampuan**  
**Rutin Kabupaten Dompu**  
**Tahun Anggaran 2007-2011**

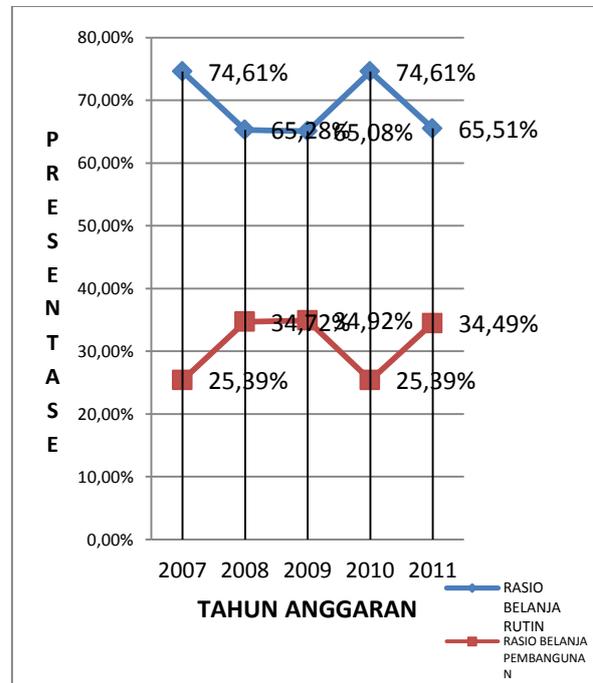


Sumber; Data diolah, 2014

### Analisis Rasio Kecerasan

Berdasarkan rasio keserasian menunjukkan bahwa belanja rutin dan belanja pembangunan yang belum stabil. Pada tahun 2007 rasio belanja rutin pemerintah daerah Kabupaten Dompu mencapai 74,61% dari total belanja sedangkan untuk rasio belanja pembangunan sebesar 25,39% dari total belanja. Kemudian pada tahun 2008 dan 2009 rasio belanja rutin pemerintah daerah Kabupaten Dompu turun sebesar 65,28 % dan 65,08% dari total belanja, sedangkan rasio belanja pambangunan pada tahun 2008 dan 2009 naik sebesar 34,72% dan 34,92% dari total belanja. Sedangkan pada tahun 2010 rasio belanja rutin pemerintah daerah Kabupaten Dompu naik menjadi 74,61% dan rasio belanja pembangunan turun menjadi 25,39% dari total belanja. Selanjutnya pada tahun 2011 rasio belanja rutin pemerintah daerah Kabupaten Dompu turun menjadi 65,51% dan rasio belanja pembangunan mengalami kenaikan menjadi 34,49% dari total belanja. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah Kabupaten Dompu lebih condong pada ekonomi kerakyatan dan belum memperhatikan pembangunan daerah, walaupun belanja pembangunan selalu naik meskipun relatif kecil. Berikut disajikan grafik 4 rasio keserasian.

**Grafik 4**  
**Hasil Perhitungan Rasio Keserasian**  
**Pemerintah Daerah Kabupaten**  
**Dompu Tahun Anggaran 2007-2011**



Sumber; Data diolah, 2014

### Analisis Rasio Pertumbuhan

Berdasarkan rasio pertumbuhan diketahui bahwa pertumbuhan PAD Kabupaten Dompu pada tahun 2007 sebesar Rp. 13.066.086.623,69, kemudian meningkat 23,62% atau sebesar Rp. 16.151.704.694,00 pada tahun 2008 dan tahun 2009 naik lagi sebesar 16,15% atau sebesar Rp. 18.760.509.931,42. Lalu pada tahun 2010 mengalami penurunan sebesar (-0,39%) atau sebesar Rp. 18.686.522.489,00 dan pada tahun 2011 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 50,66% atau sebesar Rp. 28.153.089.631,99. Kenaikan rasio pertumbuhan PAD lebih banyak dipengaruhi kenaikan pemungutan pajak dan retribusi daerah. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Dompu pada tahun anggaran 2007-2011, dilihat dari pertumbuhan PAD yang selalu positif pada tiap periodenya, yang berarti bahwa pemerintah daerah mulai dapat meningkatkan sumber pendapatan yang ada, walaupun relatif kecil sehingga dapat

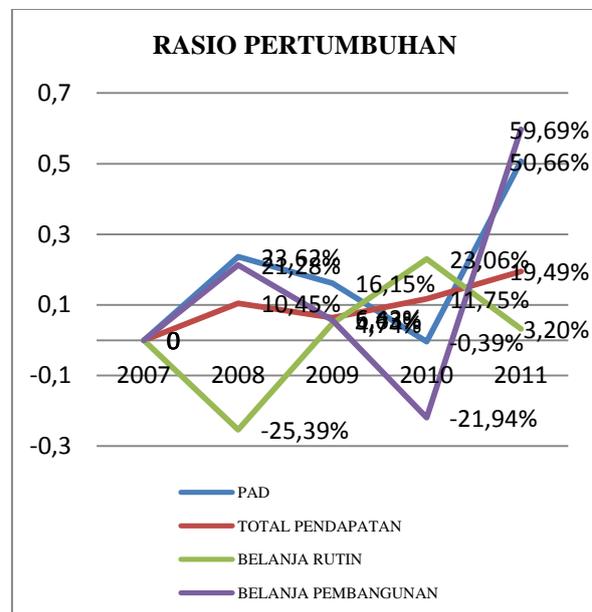
meningkatkan pertumbuhan PAD pada tiap periodenya.

Untuk pertumbuhan pendapatan, pemerintah daerah Kabupaten Dompu selalu mengalami peningkatan pada tiap tahunnya, walaupun kenaikannya relatif kecil. Pada tahun 2007 dan 2008 mengalami peningkatan dari Rp. 353.670.864.078,85 menjadi Rp. 390.632.063.515,56 atau sebesar 10,45%. Pada tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 6,43% atau sebesar Rp. 415.735.476,786,84. Dan pada tahun 2010 dan 2011 rasio pertumbuhan pada total pendapatan mengalami peningkatan sebesar 11,75% atau sebesar Rp. 464.583.392.815,67 dan peningkatan kembali pada tahun 2011 menjadi Rp. 555.132.773.497,31 atau sebesar 19,49%. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Dompu pada tahun anggaran 2007-2011 dilihat dari total pendapatan menunjukkan pertumbuhan yang positif, ini diakibatkan pemerintah daerah telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan pendapatan pada tiap periodenya, ini disebabkan semakin meningkatnya pertumbuhan PAD yang diperoleh pemerintah daerah meskipun relatif kecil.

Disisi lain, pada rasio pertumbuhan belanja rutin pada tahun 2007 semula sebesar Rp.332.473.217.915,00, turun -22,42% atau sebesar Rp. 257.937.454.296,00, ini berarti pemerintah daerah Kabupaten Dompu mulai mengurangi belanja rutin. Kemudian pada tahun 2009 naik sebesar 4,74% atau sebesar Rp.270.166.815.323,00, dan pada tahun 2010 pertumbuhan belanja rutin mengalami peningkatan sebesar 23,06% atau sebesar Rp.332.473.217.915,00 dan mengalami kenaikan kembali pada tahun anggaran 2011 menjadi Rp. 343.124.172.018,00 atau sebesar 3,20%. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Dompu pada tahun anggaran 2007-2011 dilihat dari pertumbuhan belanja rutin menunjukkan pertumbuhan yang positif akan tetapi tingkat pertumbuhan semakin kecil, ini diakibatkan oleh pemerintah daerah yang mulai mengurangi alokasi dana untuk belanja rutin.

Rasio pertumbuhan belanja pembangunan pada tahun 2007 sebesar Rp. 113.139.915.216,00 mengalami peningkatan pada tahun 2008 sebesar 21,28% atau sebesar Rp. 137.210.738.849,00, kemudian pada tahun 2009 naik menjadi 5,63%, atau sebesar Rp.144.938.988.989,00. Pada tahun 2010 mengalami penurunan sebesar -21,94% atau sebesar Rp.113.139.917.266,00 dan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2011 menjadi Rp.180.674.693.067,00 atau sebesar 59,69%. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Dompu pada tahun anggaran 2007-2011 dilihat dari belanja pembangunan menunjukkan pertumbuhan yang positif, ini membuktikan bahwa pemerintah daerah mulai merencanakan untuk hal pembangunan sarana dan prasarana di Kabupaten Dompu. Berikut disajikan Grafik 5 rasio pertumbuhan.

**Grafik 5**  
**Rasio Pertumbuhan**  
**Pemerintah daerah Kabupaten Dompu**  
**tahun anggaran 2007-2011**



Sumber; Data diolah, 2014

## PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Dompu selama tahun anggaran 2007-2011 rata-rata sebesar 4,72% dengan pola hubungan intruktif. Pola

hubungan ini menggambarkan peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Hal ini dapat dilihat dari rasio kemandirian yang dihasilkan masih berkisar antara 0,00% - 25,00%. Rasio kemandirian yang masih rendah sekali mengakibatkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Dompu dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masih sangat tergantung pada penerimaan dari pemerintah pusat. Jika rasio kemandirian keuangan dibandingkan dengan pola hubungan tingkat kemampuan daerah, maka kemampuan keuangan Kabupaten Dompu masih sangat rendah sekali (Skala 0%-25%) dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Ini disebabkan masih tingginya bantuan dari pemerintah pusat, yang diakibatkan masih rendahnya PAD yang diperoleh pemerintah daerah. Oleh sebab itu pemerintah daerah Kabupaten Dompu harus terus menggali potensi yang sudah ada maupun mencari pendapatan baru melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan melalui program yang telah menjadi prioritas daerah yaitu dibidang Pengembangan agribisnis, pariwisata industri kecil, perdagangan dan pertambangan, sehingga dengan adanya program prioritas ini dapat meningkatkan PAD, sehingga semakin tingginya PAD yang diperoleh maka tingkat kemandirian semakin tinggi dan tingkat ketergantungan dari pemerintah pusat dan provinsi atau pihak ekstern akan semakin berkurang. Jadi semakin tinggi rasio kemandirian maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan daerah dalam mendukung otonomi daerah.

Berdasarkan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) menunjukkan bahwa selama lima tahun, yaitu tahun anggaran 2007-2011 pada pemerintah Kabupaten Dompu masih dalam kemampuan keuangan yang sangat kurang, karena masih berada dalam skala interval antara 0,00 – 10,00% yaitu sebesar 4,44%. Ini berarti bahwa kemampuan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Dompu memiliki kemampuan yang sangat

kurang dalam membiayai pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan PAD di Kabupaten Dompu masih relatif kecil dibandingkan dengan total pendapatan Daerah. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Dompu masih sangat tergantung pada sumber keuangan dari pemerintah pusat. Jika rasio derajat desentralisasi fiskal dibandingkan dengan pola hubungan tingkat kemampuan daerah, maka kemampuan keuangan Kabupaten Dompu masih sangat rendah sekali (Skala 0% - 25%) dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Ini disebabkan pemerintah daerah masih sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat, yang diakibatkan masih rendahnya PAD yang diperoleh pemerintah daerah dibandingkan dengan total pendapatan. Ini berarti bahwa kemampuan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Dompu memiliki kemampuan yang sangat rendah sekali dalam membiayai pembangunan daerah. Oleh sebab itu, pemerintah Kabupaten Dompu hendaknya terus menggali potensi yang sudah ada maupun mencari pendapatan baru melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan melalui program yang telah menjadi prioritas daerah yaitu dibidang Pengembangan agribisnis, pariwisata industri kecil, perdagangan dan pertambangan, sehingga dengan adanya program prioritas ini diharapkan dapat meningkatkan PAD. Apabila PAD terus meningkat tiap tahunnya dan bantuan dari pemerintah pusat atau provinsi semakin kecil maka kemampuan keuangan daerah semakin tinggi dalam mendukung otonomi daerah.

Berdasarkan rasio Indeks Kemampuan Rutin menunjukkan bahwa selama lima tahun pada tahun anggaran 2007-2011 pemerintahan Kabupaten Dompu masih dalam skala yang sangat kurang, karena masih berada dalam skala interval antara 0,00% - 20,00% yaitu sebesar 6,76% (rata-rata IKR) dan ini berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai kemampuan yang sangat kurang untuk membiayai pengeluaran rutin dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, sehingga masih perlu banyak perbaikan guna terpenuhinya

prinsip *value for money*, hal ini terjadi karena PAD Kabupaten Dompu sangat kecil jika dibandingkan dengan nilai belanja rutin, dan selama ini lebih banyak tergantung pada sumber keuangan yang berasal dari pemerintah pusat dan provinsi. Jika rasio Indeks Kemampuan Rutin dibandingkan dengan pola hubungan tingkat kemampuan daerah, maka kemampuan keuangan Kabupaten Dompu masih sangat rendah sekali (Skala 0%-25%) dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Ini disebabkan oleh masih sangat kurangnya PAD dalam membiayai pengeluaran rutin. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh pemerintah daerah Kabupaten Dompu sangat kecil jika dibandingkan dengan nilai belanja rutin, dan selama ini lebih banyak tergantung pada sumber keuangan yang berasal dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu, pemerintah Kabupaten Dompu sebaiknya terus menggali potensi yang sudah ada maupun mencari pendapatan baru melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan melalui program yang telah menjadi prioritas daerah yaitu dibidang Pengembangan agribisnis, pariwisata industri kecil, perdagangan dan pertambangan, sehingga dengan adanya program prioritas ini diharapkan dapat meningkatkan PAD. Apabila PAD terus meningkat tiap tahunnya maka pemerintah daerah akan mampu untuk membiayai pengeluaran rutin yang ada dalam melaksanakan kegiatan pemerintahannya, karena semakin tinggi indeks kemampuan rutin maka kemampuan keuangan daerah semakin tinggi dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan Rasio Keserasian menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir pemerintah daerah Kabupaten Dompu menggunakan sebagian besar dana yang dimiliki masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja rutin sehingga rasio belanja pembangunan terhadap APBD relatif kecil. Ini dapat dibuktikan dari rasio belanja rutin yang selalu lebih besar dari rasio belanja pembangunan dan tingkat pertumbuhan belanja rutin jauh lebih besar dari pada tingkat pertumbuhan belanja

pembangunan. Hasil rata-rata dari rasio belanja pembangunan sebesar 30,98% dan rata-rata rasio belanja rutin sebesar 69,02%, terdapat *gap* sebesar 36,04%. Besarnya alokasi dana untuk belanja rutin terutama dikarenakan banyaknya kegiatan dari dinas-dinas dan belanja pegawai untuk gaji PNS. Dengan ini dapat menunjukkan pemerintah Kabupaten Dompu yang lebih condong pada ekonomi kerakyatan belum memperhatikan pembangunan daerah, walaupun belanja pembangunan yang selalu naik meskipun relatif kecil. Hal ini dikarenakan belum ada patokan yang pasti untuk belanja pembangunan, sehingga pemerintah daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja rutin yang mengakibatkan belanja pembangunan untuk pemerintah Kabupaten Dompu kecil atau belum terpenuhi. Jika rasio keserasian dibandingkan dengan pola hubungan tingkat kemampuan daerah, maka kemampuan keuangan Kabupaten Dompu masuk dalam kategori sedang (skala 50%-75%) dalam membiayai belanja rutin dan rendah (skala 25%-50%) dalam membiayai belanja pembangunan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, walaupun pada saat ini pemerintah daerah Kabupaten Dompu masih memprioritaskan belanjanya pada belanja rutin dibanding belanja pembangunan yang digunakan untuk sarana prasarana ekonomi masyarakat belum menjadi prioritas. Dengan adanya program yang telah menjadi prioritas daerah yaitu dibidang Pengembangan agribisnis, pariwisata industri kecil, perdagangan dan pertambangan, diharapkan dapat meningkatkan PAD. Apabila PAD terus meningkat tiap tahunnya maka pemerintah daerah akan mampu untuk membiayai pengeluaran yang ada. Semakin tinggi alokasi dana pemerintah daerah pada belanja rutin dan belanja pembangunan, sehingga semakin tinggi rasio keserasian, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan daerah dalam mendukung otonomi daerah.

Berdasarkan Rasio Pertumbuhan menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Dompu dalam mengelola keuangan daerahnya yaitu dilihat dari perhitungan rasio

Pendapatan Asli Daerah, Rasio Pertumbuhan Pendapatan, Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin, dan Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Dompu pada tahun anggaran 2007-2011. Menunjukkan pertumbuhan rata-rata yang positif. Hal ini diakibatkan pertumbuhan nilai PAD dan total pendapatan daerah diikuti oleh pertumbuhan belanja pembangunan. Artinya bahwa pemerintah daerah Kabupaten Dompu telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode satu ke periode yang berikutnya. Dengan mengetahui pertumbuhan masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, maka dapat dilakukan evaluasi terhadap potensi-potensi daerah yang perlu mendapat perhatian. Semakin tinggi persentase pertumbuhan setiap komponen pendapatan dan pengeluaran, maka semakin besar kemampuan Pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah serta dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari setiap periode serta dalam hal pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Dompu masih perlu banyak perbaikan guna terpenuhinya prinsip *value for money*. Jika rasio pertumbuhan dibandingkan dengan pola hubungan tingkat kemampuan daerah maka kemampuan keuangan Kabupaten Dompu masih berada pada tingkat pertumbuhan yang rendah sekali atau masih berada dalam skala 0%-25%. Ini disebabkan masih rendahnya PAD yang diperoleh oleh pemerintah daerah dan tidak sebanding dengan pengeluaran yang ada. Oleh sebab itu, pemerintah Kabupaten Dompu harus terus menggali potensi yang sudah ada maupun mencari pendapatan baru melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program Pemerintah Kabupaten Dompu harus terus menggali potensi yang ada dan mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta guna untuk meningkatkan PAD dan pemerintah daerah Kabupaten Dompu harus mampu mengembangkan

program yang telah menjadi prioritas daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu melalui program Pengembangan Usaha Agribisnis Berbasis Komoditi Lokal, meliputi : pengembangan sapi, pengembangan jagung dan pengembangan rumput laut (PIJAR). Selain dari program Pijar pemerintah Kabupaten Dompu juga harus dapat meningkatkan pengembangan Koperasi dan UMKM, pengembangan Pariwisata, penguatan kapasitas fiskal daerah, penguatan ketersediaan pangan utama yaitu padi dan Peningkatan investasi dan perluasan kesempatan kerja. Sehingga dengan adanya program yang menjadi prioritas kabupaten dompu ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan kemandirian/kemampuan serta mengatasi kekurangan dalam hal pembiayaannya dalam rangka membiayai kegiatan pembangunan pemerintahan, dan diharapkan Pemerintah daerah Kabupaten Dompu juga harus dapat terus mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan pada setiap periodenya, sehingga dapat meningkatkan tingkat kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Dompu dalam lima tahun terakhir masih menunjukkan pola hubungan instruktif karena peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah dengan rasio kemandirian daerah rata-rata mencapai 4,72%. Jika dibandingkan dengan pola hubungan tingkat kemampuan daerah maka kemampuan keuangan pemerintah kabupaten Dompu masih rendah sekali (skala 0% - 25%) dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, bahwa pemerintah daerah Kabupaten Dompu selama lima tahun terakhir menunjukkan angka rata-rata sebesar 4,29%

dengan kemampuan keuangan yang tergolong sangat kurang karena masih berada dalam skala interval antara 0,00 – 10,00%. Hasil ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Dompu belum mampu membiayai pengeluarannya sendiri. Pemerintah Kabupaten Dompu masih bergantung kepada pemerintah pusat dalam hal pembiayaan pengeluaran. Jika dibandingkan dengan pola hubungan tingkat kemampuan daerah maka kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten Dompu masih rendah sekali (skala 0% - 25%) dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan kemampuan PAD untuk membiayai pengeluaran rutin daerah, yang sering disebut juga dengan Rasio Indeks Kemampuan Rutin (IKR) menunjukan bahwa selama lima tahun terakhir pemerintah daerah Kabupaten Dompu rata-rata hanya sebesar 6,76% dengan pola kemampuan keuangan yang masih berada dalam interval antara 0,00% - 20,00%, ini berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai kemampuan yang sangat kurang untuk membiayai pengeluaran rutin. Jika dibandingkan dengan pola hubungan tingkat kemampuan daerah maka kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten Dompu masih rendah sekali (skala 0% - 25%) dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan Rasio Kesenjangan, pemerintah Kabupaten Dompu masih lebih memprioritaskan belanja rutin dari pada belanja pembangunan. Hasil rata-rata dari rasio belanja pembangunan sebesar 32,38% dan rata-rata rasio belanja rutin sebesar 67,62%. Terdapat kesenjangan sebesar 35,24%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa pemerintah belum memperhatikan pembangunan daerah. Hal ini disebabkan keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Dompu sehingga pemerintah daerah lebih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja rutin dan penghematan pada belanja lainnya. Jika dibandingkan dengan pola hubungan tingkat kemampuan daerah maka kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten Dompu

masuk kategori rendah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan Rasio Pertumbuhan (*growth ratio*), kondisi pertumbuhan APBD Kabupaten Dompu pada tahun anggaran 2007-2011 menunjukkan pertumbuhan rata-rata yang positif. Hal ini diakibatkan pertumbuhan nilai PAD dan total pendapatan daerah diikuti oleh pertumbuhan belanja pembangunan. Artinya bahwa pemerintah daerah Kabupaten Dompu telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode satu ke periode yang berikutnya. Jika rasio pertumbuhan dibandingkan dengan pola hubungan tingkat kemampuan daerah maka kemampuan keuangan Kabupaten Dompu masih berada pada tingkat pertumbuhan yang rendah sekali atau masih berada dalam skala 0%-25%.

### **Saran**

Pemerintah daerah Kabupaten Dompu perlu mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang ada atau dengan meminta kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber pendapatan lain yang masih dikuasai oleh pemerintah pusat/propinsi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), sehingga dapat mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat.

Melakukan penyederhanaan, penyempurnaan mekanisme dan prosedur, serta penataan ulang jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah ataupun jenis penerimaan daerah lainnya, agar dapat meningkatkan efektivitas sumber-sumber PAD dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Meningkatkan pembangunan pada sektor utama yang digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan fisik daerah, pembangunan jalan, irigasi, jaringan serta fasilitas umum masyarakat.

Untuk penelitian selanjutnya disarankan obyek penelitiannya dilakukan lebih dari satu Kota atau Kabupaten sehingga terdapat perbandingan antara Kota atau Kabupaten yang satu dengan yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2007, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.
- Anas Arista Nurjuha, 2009, Mengukur Tingkat Efektifitas, Tingkat Kemandirian, Dan Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Kota Malang Tahun Anggaran 2003-2007), *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Anonimous, *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, 2006, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, *Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 yang diubah menjadi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)*, 2006, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*, 2005, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah*, 2001, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah*, 2001, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, 2004, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*, 2004, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang Republik Indonesia. 2000. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*, 2000, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Strategi Prioritas Kabupaten Dompu*, (Online), (<http://dompukab.go.id/>, diakses 10 Mei 2014).
- Ayu Febriyanti Puspitasari, 2013, Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011, *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Helfert, Erich A., 2007, *Teknik Analisis Keuangan*, Erlangga, Jakarta.
- I KetutRahyuda, 2004, *Buku Ajar Metodologi Penelitian*, Universitas Udayana, Denpasar.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah*, (Online), ([http://www.ekonomirakyat.org/edisi4/artikel\\_3.htm](http://www.ekonomirakyat.org/edisi4/artikel_3.htm), diakses 1 Desember 2013)
- \_\_\_\_\_, 2004, *Otonomi dan manajemen keuangan Daerah*, Edisi Kedua, ANDI Yogyakarta.
- Mudrifah, 2012, Analisis Komparatif Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten Trenggalek Dan Tulungagung), *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Mohammad Nasir, 2003, *Metode penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nataluddin, 2001. *Potensi dana perimbangan pada pemerintahan daerali di Propinsi Jambi*, *Manajemen Keuangan Daerah*, UPP YKPN, Yogyakarta.
- Nirzawan, 2001, Tinjauan umum terhadap sistem pengelolaan Keuangan Daerah di Bengkulu Utara, *Manajemen Keuangan Daerah*. UPP YKPN, Yogyakarta.
- Yuliati, 2001, Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam menghadapi Otonomi Daerah, *Manajemen Keuangan Daerah*, UPPYKPN, Yogyakarta.
- Zulkifly Prabowo Damanhuri, 2013, Analisa Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Di

Jawa Timur Tahun Anggaran 2007-  
2011, *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Universitas Brawijaya Malang.